

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 01/SPMK/PPK INTI/VI/2025

Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultan Layanan TI DC

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DWI ARIEF PUJA SAKTI

Kepala Sub Bagian Pengelola Belanja Lainnya
Jalan Mayjend Sutoyo No 12 Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan Layanan TI DC nomor 01/KONTRAK/PPK INTI/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025, bersama ini memerintahkan:

PT Bangsawan Cyberindo Indonesia

Komplek Pinang Griya Permai, Blok B, Jl. Nuri No.152 D, Pinang - Tangerang
yang dalam hal ini diwakili oleh: MASDAR SYAMAN SOLEH
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan: Pengadaan Jasa Konsultan Layanan TI DC
2. Tanggal mulai kerja: 2 Juni 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 7 Bulan Kalender(2 Juni 2025) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2025
5. Hasil Pekerjaan: sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan perubahannya(jika ada).
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2 Juni 2025

Untuk dan atas nama BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

Pejabat Penandatangan Kontrak



DWI ARIEF PUJA SAKTI

Kepala Sub Bagian Pengelola Belanja Lainnya

NIP. [REDACTED]

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT Bangsawan Cyberindo Indonesia



MASDAR SYAMAN SOLEH

DIREKRTUR

Keterangan:

Arsip I (satu) disimpan oleh Badan Usaha, Arsip II disimpan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 04/SPMK/DIT.INTI/IV/2025

Paket Pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultan Layanan TI DC Mei 2025
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dwi Arief Puja Sakti, S.E.
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jasa Konsultan Layanan TI DC Mei 2025 nomor 04/SPK/DIT.INTI/IV/2025 tanggal 30 April 2025, bersama ini memerintahkan:

PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia

Komplek Pinang Griya Permai, Blok B, Jl. Nuri No.152 D, Pinang - Tangerang
yang dalam hal ini diwakili oleh: Masdar Syaman Sholeh
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan: Pengadaan Jasa Konsultan Layanan TI DC Mei 2025
2. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
3. Waktu penyelesaian: selama 1 (Satu) bulan kalender mulai tanggal 1 Mei 2025 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Mei 2025
4. Denda: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

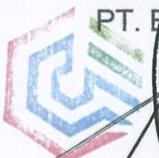
Jakarta, 30 April 2025

Pejabat Pembuat Komitmen Pada
Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi

Dwi Arief Puja Sakti, S.E.

NIP. [REDACTED]

Menerima dan menyetujui:

PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia

BANGSAWAN
Cyberindo Indonesia

Masdar Syaman Sholeh

Direktur



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

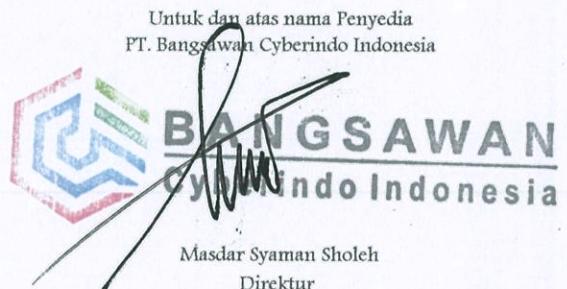
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
	NOMOR : 04/SPK/DIT.INTI/IV/2025 TANGGAL : 30 April 2025
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	Dwi Arief Puja Sakti, S.E. Selaku PPK Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi
Nama Penyedia:	Masdar Syaman Sholeh Selaku Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia
PAKET PENGADAAN : Pengadaan Jasa Konsultan Layanan TI DC Mei 2025	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 03/UND/DIT INTI/PP IX/IV/2025 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 28 April 2025 NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 03/BAHPL/DIT INTI/PP IX/IV/2025 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 29 April 2025
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA APBN BKN Tahun Anggaran 2025 Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi MAK.3648.EBA.962.053.0B.522131 Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 37.185.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)	Jenis Kontrak : waktu penugasan
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 1 (bulan) bulan kalender terhitung mulai pada 1 Mei 2025 – 31 Mei 2025	Untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta Pejabat Pemuaui Komitmen
Dwi Arief Puja Sakti, S.E. NIP. [REDACTED]	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia   Masdar Syaman Sholeh Direktur

Lampiran Surat Perintah Kerja

Nomor : 04/SPK/DIT.INTI/IV/2025
Tanggal : 30 April 2025

NO	JENIS BARANG/JASA	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL BIAYA (RP)	Keterangan
A	Biaya Personil				
1	System Database Engineer - Pendidikan Minimal S1 - Pengalaman Kerja Minimal 8 Tahun	1	OB 17.800.000,00	17.800.000,00	1 orang x 1 bulan
2	System Network Engineer - Pendidikan Minimal S1 - Pengalaman Kerja Minimal 6 Tahun	1	OB 15.800.000,00	15.800.000,00	1 orang x 1 bulan
3	LAPORAN	5	OB 80.000,00	400.000,00	5 buah x 1 bulan
JUMLAH				38.500.000,00	
PPN 11%				3.685.000,00	
JUMLAH SELURUHNYA				37.185.000,00	

Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA NOMOR : 04/SPK/DIT.INTI/IV/2025 TANGGAL : 30 April 2025
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	Dwi Arief Puja Sakti, S.E. Selaku PPK Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi
Nama Penyedia:	Masdari Syaman Sholeh Selaku Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia
PAKET PENGADAAN : Pengadaan Jasa Konsultan Layanan TI DC Mei 2025	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 03/UND/DIT INTI/PP IX/IV/2025 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 28 April 2025 NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 03/BAHPL/DIT INTI/PP IX/IV/2025 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 29 April 2025
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA APBN BKN Tahun Anggaran 2025 Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi MAK.3648.EBA.962.053.0B.522131	Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 37.185.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
Jenis Kontrak : waktu penugasan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 1 (bulan) bulan kalender terhitung mulai pada 1 Mei 2025 – 31 Mei 2025	
Untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia
Dwi Arief Puja Sakti, S.E. NIP. [REDACTED]	Masdari Syaman Sholeh Direktur

Lampiran Surat Perintah Kerja

Nomor : 04/SPK/DIT.INTI/IV/2025
 Tanggal : 30 April 2025

NO	JENIS BARANG/JASA	SATUAN		HARGA SATUAN (RP)	TOTAL BIAYA (RP)	Keterangan
A	Biaya Personil					
1	System Database Engineer - Pendidikan Minimal S1 - Pengalaman Kerja Minimal 8 Tahun	1	OB	17.300.000,00	17.300.000,00	1 orang x 1 bulan
2	System Network Engineer - Pendidikan Minimal S1 - Pengalaman Kerja Minimal 6 Tahun	1	OB	15.800.000,00	15.800.000,00	1 orang x 1 bulan
3	LAFORAN	5	OB	80.000,00	400.000,00	5 buah x 1 bulan
JUMLAH				38.500.000,00		
PPN 11%				3.685.000,00		
JUMLAH SELURUHNYA				37.185.000,00		

Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

Untuk dan atas nama
 Badan Kepegawaian Negara
 Kantor Pusat Jakarta
 Pejabat Pembuat Komitmen

 Dwi Arief Puja Sakti, S.E.
 NIP. [REDACTED]

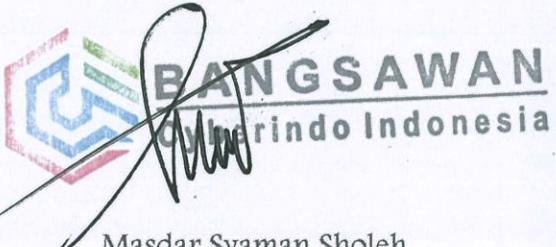
Untuk dan atas nama Penyedia
 PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia


 Masdar Syaman Sholeh
 Direktur



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA NOMOR : 04/SPK/DIT.INTI/IV/2025 TANGGAL : 30 April 2025
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	Dwi Arief Puja Sakti, S.E. Selaku PPK Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi
Nama Penyedia:	Masdar Syaman Sholeh Selaku Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia
PAKET PENGADAAN : Pengadaan Jasa Konsultan Layanan TI DC Mei 2025	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 03/UND/DIT INTI/PP IX/IV/2025 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 28 April 2025 NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 03/BAHPL/DIT INTI/PP IX/IV/2025 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 29 April 2025
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA APBN BKN Tahun Anggaran 2025 Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi MAK.3648.EBA.962.053.0B.522131	Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 37.185.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
Jenis Kontrak : waktu penugasan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 1 (bulan) bulan kalender terhitung mulai pada 1 Mei 2025 – 31 Mei 2025	
Untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia
 Dwi Arief Puja Sakti, S.E. NIP. [REDACTED]	 Masdar Syaman Sholeh Direktur

Lampiran Surat Perintah Kerja

Nomor : 04/SPK/DIT.INTI/IV/2025

Tanggal : 30 April 2025

NO	JENIS BARANG/JASA	SATUAN		HARGA SATUAN (RP)	TOTAL BIAYA (RP)	Keterangan
A	Biaya Personil					
1	System Database Engineer - Pendidikan Minimal S1 - Pengalaman Kerja Minimal 8 Tahun	1	OB	17.300.000,00	17.300.000,00	1 orang x 1 bulan
2	System Network Engineer - Pendidikan Minimal S1 - Pengalaman Kerja Minimal 6 Tahun	1	OB	15.800.000,00	15.800.000,00	1 orang x 1 bulan
3	LAFORAN	5	OB	80.000,00	400.000,00	5 buah x 1 bulan
JUMLAH				33.500.000,00		
PPN 11%				3.685.000,00		
JUMLAH SELURUHNYA				37.185.000,00		

Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

Untuk dan atas nama
 Badan Kepegawaian Negara
 Kantor Pusat Jakarta
 Pejabat Pembuat Komitmen

Dwi Arief Pura Sakti, S.E.
 NIP. [REDACTED]

Untuk dan atas nama Penyedia
 PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia

 **BANGSAWAN**
Cyberindo Indonesia

Masdar Syaman Sholeh
 Direktur

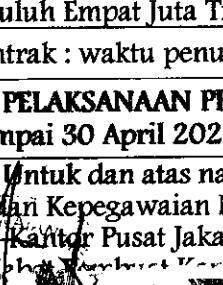
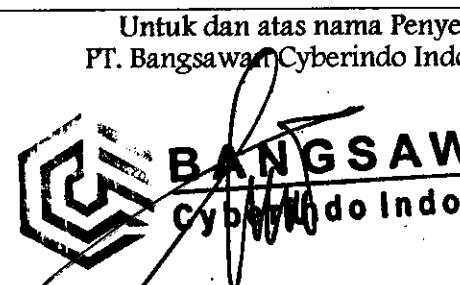


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id | Pos-el: humas@bkn.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
		NOMOR : 02/SPK/DIT.INTI/II/2025 TANGGAL : 28 Februari 2025
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:		Dwi Arief Puja Sakti, S.E. Selaku PPK Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi
Nama Penyedia:		Masdar Syaman Sholeh Selaku Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia
PAKET PENGADAAN : Jasa Konsultan Layanan Teknologi Informasi Data Center		<p>NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 02/UND/DIT INTI/PP IX/II/2025</p> <p>TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 26 Februari 2025</p> <p>NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 02/BAHPL/DIT INTI/PP IX/II/2025</p> <p>TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 27 Februari 2025</p>
<p>SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA APBN BKN Tahun Anggaran 2025 Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi MAK 3648.CCL.001.052.AA.522131</p> <p>Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 74.370.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>Jenis Kontrak : waktu penugasan</p> <p>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 2 (dua) bulan kalender terhitung mulai pada 1 Maret 2025 sampai 30 April 2025</p>		
 <p>Untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta Pejabat Yang bertanggung jawab Dwi Arief Puja Sakti, S.E. NIP. [REDACTED]</p>		<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia</p>  <p>Masdar Syaman Sholeh Direktur</p>

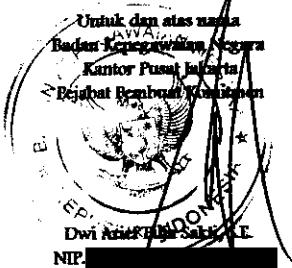
Lampiran Surat Perintah Kerja

Nomor : 02/SPK/DIT. INTI/II/2025

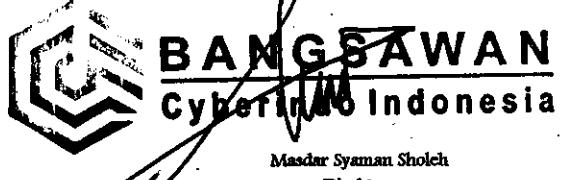
Tanggal : 28 Februari 2025

NO	JENIS BARANG/JASA	SATUAN		HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	Keterangan
A	Biaya Personil					
1	System Network Engineer - Pendidikan Minimal S1 - Pengalaman Kerja Minimal 6 Tahun	2	OB	15,800,000.00	31,600,000.00	1 orang x 2 bulan
2	System Database Engineer - Pendidikan Minimal S1 - Pengalaman Kerja Minimal 8 Tahun	2	OB	17,300,000.00	34,600,000.00	1 orang x 2 bulan
3	LAPORAN	10	OB	80,000.00	800,000.00	5 buah x 2 bulan
JUMLAH					67,000,000.00	
PPN 11%					7,370,000.00	
JUMLAH SELURUHNYA					74,370,000.00	

Terbilang : Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah



Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia



Masdar Syaman Sholeh
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
- 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

- 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

15. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

20. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

22. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 02/SPMK/DIT.INTI/II/2025

Paket Pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultan Layanan TI DC
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dwi Arief Puja Sakti, S.E.
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jasa Konsultan Layanan TI DC nomor 02/SPK/DIT.INTI/II/2025 tanggal 28 Februari 2025, bersama ini memerintahkan:

PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia

Komplek Pinang Griya Permai, Blok B, Jl. Nuri No.152 D, Pinang - Tangerang
yang dalam hal ini diwakili oleh: Masdar Syaman Sholeh
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan: Pengadaan Jasa Konsultan Layanan TI DC
2. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
3. Waktu penyelesaian: selama 2 (dua) bulan kalender mulai tanggal 1 Maret 2025 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 April 2025
4. Denda: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta, 28 Maret 2025

Pejabat Pembuat Komitmen Pada
Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi

Dwi Arief Puja Sakti, S.E.

NIP. [REDACTED]

Menerima dan menyetujui:

PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia
BANGSAWAN
Cyberindo Indonesia

Masdar Syaman Sholeh

Direktur



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA NOMOR : 02/SPK/DIT.INTI/II/2025 TANGGAL : 28 Februari 2025
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	Dwi Arief Puja Sakti, S.E. Selaku PPK Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi
Nama Penyedia:	Masdari Syaman Sholeh Selaku Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia
PAKET PENGADAAN : Jasa Konsultan Layanan Teknologi Informasi Data Center	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 02/UND/DIT INTI/PP IX/II/2025 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 26 Februari 2025 NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 02/BAHPL/DIT INTI/PP IX/II/2025 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 27 Februari 2025
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA APBN BKN Tahun Anggaran 2025 Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi MAK 3648.CCL.001.052.AA.522131 Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 74.370.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)	Jenis Kontrak : waktu penugasan
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 2 (dua) bulan kalender terhitung mulai pada 1 Maret 2025 sampai 30 April 2025	
Untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta Pejabat Penandatangan Dwi Arief Puja Sakti, S.E. NIP [REDACTED]	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia BANGSAWAN Cyberindo Indonesia Masdar Syaman Sholeh Direktur

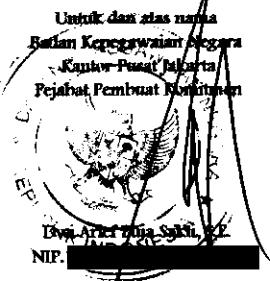
Lampiran Surat Perintah Kerja

Nomor : 02/SPK/DIT.INTI/II/2025

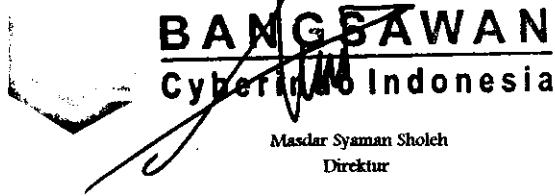
Tanggal : 28 Februari 2025

NO	JENIS BARANG/JASA	SATUAN		HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	Keterangan
A	Biaya Persoal					
1	System Network Engineer - Pendidikan Minimal S1 - Pengalaman Kerja Minimal 6 Tahun	2	OB	15,800,000.00	31,600,000.00	1 orang x 2 bulan
2	System Database Engineer - Pendidikan Minimal S1 - Pengalaman Kerja Minimal 8 Tahun	2	OB	17,300,000.00	34,600,000.00	1 orang x 2 bulan
3	LAPORAN	10	OB	80,000.00	800,000.00	5 buah x 2 bulan
JUMLAH					67,000,000.00	
PPN 11%					7,370,000.00	
JUMLAH SELURUHNYA					74,370,000.00	

Terbilang : Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah



Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia



SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

- 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

15. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

16. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

17. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

18. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.

- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

19. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan system sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

20. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

22. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.